

Dakwah Kultural KGPH Puger dalam Mengatasi Radikalisme Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Abd. Halim¹

Abstract: This paper deals with the cultural da'wah conducted by Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger in overcoming the radical teachings in Surakarta Kasunanan area. Using the functionalism perspective, this article argues that kings as symbols of the center of cultural power which are responsible for being an ideal figure, acceptable to all classes and streams, capable of bringing unity into diversity. Cultural treasures, the historical records of the palace, and the values of local wisdom are the cultural capital needed to be applied. Islamic cultural da'wah that has been featured in the history of the palace, in fact has been a reference for them that Muslims in the Kasunanan Surakarta region ever lived in an era of glaciers without anarchism and without radicalism.

Keywords: KGPH Puger, palace, cultural da'wah , radicalism, functionalism.

Abstrak: Tulisan ini membahas secara mendalam dakwah kultural yang dilakukan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger dalam upaya mengatasi ajaran radikal di wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan menggunakan perspektif fungsionalisme, artikel ini berpendapat bahwa raja dan keraton sebagai simbol pusat kekuasaan kultural bertanggungjawab untuk kembali tampil menjadi sosok ideal, yang diterima semua golongan dan aliran, yang mampu membawa persatuan dalam keragaman. Khazanah-khazanah kultural, catatan emas sejarah keraton, dan nilai-nilai lokalitas adalah modal kultural perlu diaplikasikan. Dakwah Islam kultural yang sudah ditampilkan dalam sejarah keraton, sebenarnya pernah menjadi rujukan bagi mereka bahwa umat muslim di wilayah keraton Kasunanan Surakarta pernah hidup di era kegemilangan tanpa anarkisme dan tanpa radikalisme.

Kata Kunci: KGPH Puger, keraton, dakwah kultural, radikalisme, fungsionalisme.

¹ Penulis adalah dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendahuluan

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger adalah salah satu kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang memiliki basis interpretatif atas makna Islam, negara dan budaya. Struktur pengetahuannya ditopang pilar-pilar prinsipil yang tidak semata penting dikaji secara ilmiah melainkan juga menjadi bahan refleksi psikologis dan panduan bagi keyakinan. Substansi dari semua itu adalah kemungkinan memahami silang sengkait tatacara masyarakat dan bangsa yang ideal dalam beragama, bernegara, dan berkebudayaan.²

Dengan meyakini tujuan utama hidup manusia adalah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, KGPH Puger mendedah lebih detail langkah-langkah konkrit sekaligus strategis dalam rangka menggiring umat ke jalan Tuhan, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta mengabaikan semua tujuan selain kepada diri-Nya. Dalam konteks ini, keyakinan KGPH Puger yang tidak bisa dilepaskan menurutnya adalah pentingnya eksistensi dan peran maksimum sebuah negara, atau dalam konteks yang lebih sempit: keraton.

Dalam catatan sejarah, para raja sebagai individu dan keraton-keraton sebagai institusi adalah instrumen-instrumen mekanis yang beroperasi untuk penegakan agama Tuhan di muka bumi. Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sebagaimana para leluhurnya, mengemban amanah dan fungsi yang serupa. Fakta historis dan sosiologis ini menjadi fondasi bangunan pemikiran KGPH Puger untuk mengatakan dengan lantang bahwa Raja dan Kerajaan Solo akan tetap selamanya berjalan di bawah ajaran Tuhan.

Namun, kuasa waktu sering kali berhasil menghancurkan idealisme, entah dengan cara menenggelamkan tokoh-tokoh idealis yang layak menjadi panutan umat ataupun sulitnya muncul tokoh idealis baru sebagai pengganti yang lama. Problem besar yang ditimbulkan adalah ketidakmampuan sebagian besar masyarakat memahami substansi dan esensi hidup di muka bumi, bagaimana sejatinya menjalankan ajaran agama Tuhan, dan apa sikap terhadap negara dan budaya. Kegagalan ini

² Semua pendapat yang dikutip dari pemikiran Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger didapat dari wawancara langsung pada 24 Juli 2016 di kediaman beliau Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

ditandai dengan keterputusan mata rantai yang mengikat tiga bandul utamanya; Islam, negara dan budaya, kemudian menempatkan masing-masing secara terpisah, bahkan saling menegasikan satu sama lain.

Islam yang dipisahkan dari dan dipertentangkan dengan negara (baca: keraton) oleh para pendukungnya ditandai dengan 'rasa percaya diri' berlebih, yang membuat mereka mengabaikan urgensi keraton sebagai 'pasak bumi', tempat menambatkan segala kepercayaan dan keyakinan. Ada sebuah *gap* (celah) yang sengaja diciptakan supaya wilayah pengaruh keraton beroperasi terpisah jauh dari wilayah pengaruh tokoh-tokoh agama menjangkit massa. Dari waktu ke waktu, jurang pemisah ini diperlebar dan dipertahankan supaya keterputusan tetap terjaga.

KGPH Puger menyadari dengan sangat *titis* dan kritis akan kenyataan tersebut. Dia mengamini peristiwa-peristiwa radikalisme yang memenuhi halaman-halaman media massa, Sosok yang hingga kini (2015-sekarang) menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PB XIII ini mengatakan bahwa umat muslim Solo terutama seperti sedang kehilangan panutannya. Terlalu banyak kelompok, terlalu banyak aliran, sedang mereka tidak mampu menyelami kedalaman perbedaan untuk menemukan titik kesamaan, sehingga mereka terjebak pada tipu daya *truth claims* dan tidak mampu berpegang teguh pada prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.

Ketika kelompok-kelompok agama yang berkembang pesat di Solo terpisah atau dipertentangkan dengan negara (keraton) maka pecah belah pasti terjadi. Seperti perahu tanpa jangkar, seperti anak ayam tanpa induk. Konsekuensi lain yang lebih parah, yang ditimbulkan oleh keterpisahan dan pemisahan agama dari keraton, adalah kecurigaan terus-menerus terhadap kebudayaan. Budaya Jawa pada khususnya dan nusantara pada umumnya ditempatkan sebagai musuh, yang *vis-a-vis* agama. Kecurigaan berlebih terhadap budaya mendorong para tokoh agama (baca: radikal) untuk membangun tembok pembatas yang tidak bisa ditembus, dengan harapan praktek keagamaan mereka murni dan bersih dari pengaruh budaya.

Alhasil, realitas keberagaman umat muslim di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah cerminan dari kekosongan

Abd. Halim

tokoh ideal, panutan, suri tauladan, yang *wicaksono*. Pengertian '*wicaksono* (bijaksana)' di sini adalah karakter yang memiliki kemampuan untuk menembus batas-batas perbedaan, untuk menyadarkan masyarakat tentang aspek-aspek perbedaan dan aspek-aspek persamaan, dan pada akhirnya untuk menggiring pada persatuan dalam keragaman, toleran, santun dan ramah terhadap orang lain. *Wicaksono* adalah pribadi yang mampu menyambung kembali 'tali-temali kesadaran' untuk merangkai tiga dimensi kehidupan (beragama, bernegara, dan berbudaya) menjadi satu untaian mutiara yang indah.

Pemikiran progresif KGPH Puger yang tergambar dalam latar belakang masalah ini sangat menarik bila dikaji dari sudut pandang fungsionalisme. Pertanyaan-pertanyaan yang akan bermunculan seperti: bagaimana KGPH Puger memahami konsep Islam sebagai wahyu Tuhan yang harus dilaksanakan oleh umat manusia di muka bumi?, bagaimana peran keraton yang harus eksis demi penegakan ajaran-ajaran agama?, bagaimana budaya lokal masyarakat setempat seharusnya dihargai agar Islam *rahmatan lil alamin* betul-betul terasa?, dan terakhir bagaimana radikalisme atas nama agama bisa berhenti supaya tidak menciderai wajah Islam di satu sisi, dan agar tidak merusak kehidupan manusia di muka bumi di sisi lain?.

Fungsionalisme adalah suatu kerangka berpikir yang memotret bagaimana sesuatu, hal, peristiwa, fakta sosial, memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Bagi Raho (2007) fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang bisa diamati, bisa dibuat, dengan tujuan beradaptasi pada lingkungan atau untuk penyesuaian diri terhadap suatu sistem tertentu. Di sini, fungsi dapat dimengerti sebagai sebuah efek yang muncul di kemudian atau setelah adanya sesuatu yang mampu memunculkan efek. Dengan kata lain, fungsi berbeda dari sesuatu itu sendiri. Contoh, kebijakan publik yang adil, misalnya, memiliki fungsi ketentraman sosial. Kebijakan adalah sesuatu yang berbeda dari ketentraman. Kebijakan dan ketentraman memiliki hubungan fungsionalis.

Namun begitu, para pakar teori fungsionalisme ini terus berkarya, sehingga teori ini berkembang. Robert K. Merton (dalam Raho 2007) misalnya, mengembangkan teori fungsionalisme dengan menambahkan

beberapa kategori, seperti: *disfunction* (disfungsi), *manifest function* (fungsi yang tampak), dan *latent function* (fungsi yang tak tampak). Disfungsi dapat berarti bahwa sesuatu tidak menimbulkan fungsi ideal yang seharusnya (*das sollen*), bahkan sebaliknya, menimbulkan fungsi negatif yang merugikan. Konsekuensi-konsekuensi negatif ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *disfunction* (Ritzer, 2013:429).

Manifest function adalah kebalikan dari *latent function*. Bila *manifest function* dipahami sebagai fungsi-fungsi yang diharapkan betul-betul terjadi, maka *latent function* adalah fungsi-fungsi yang tidak diharapkan terjadi. Apa perbedaan *disfunction* dan *latent function*? *Disfunction* pada dirinya sendiri memang tidak diharapkan, dan tampak tidak diharapkan. Sedangkan *latent function* pada dirinya sendiri tidak diharapkan, tetapi bila ditelisik lebih mendalam, maka fungsi sosiologisnya sangat diharapkan. Karena itulah, *latent function* diartikan sebagai fungsi yang tidak tampak, kebalikan dari *manifest function* (Wulansari, 2013:178).

Bagi Ritzer (2013) bahwa cara mengoperasikan teori fungsionalisme dalam menganalisa fakta sosiologis adalah dengan memandang secara fokus terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh fakta sosiologis tersebut, dan sedikit menghindari pembahasan tentang motif-motif yang melatarbelakanginya. Hal ini sebenarnya merupakan karakter umum cara operasional teori fungsionalisme struktural. Motif dari satu agen sosial atau fakta sosial itu sendiri tidak bisa ditelusuri melalui pencarian ke dalam melainkan pencarian terhadap lingkungan sekitar yang membentuknya. Jadi, dalam kasus semacam itu, fakta sosial adalah konsekuensi dari fakta sosial lainnya.

Dalam tulisan ini, KGPH Puger ditempatkan sebagai salah satu aktor sosial hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang sudah membentuk satu sistem tatanan struktural. KGPH Puger selaku *rijaalud-dakwah* beserta pemikiran-pemikirannya adalah konsekuensi, baik yang tampak maupun tak tampak, dari struktur-struktur yang melingkupinya. Dengan kata lain, idealisme KGPH Puger dapat dikatakan cerminan dan reaksi terhadap struktur di luar yang membentuknya. Dia (baca- KGPH Puger) adalah representasi pelaku dakwah sebagai penjaga harmoni

Abd. Halim

bangunan agama, negara dan budaya yang berlangsung turun-temurun. Tugasnya untuk memastikan bahwa ketentraman sosial harus benar-benar berlangsung.

Eksistensi Keraton sebagai Pewaris Kekhalifahan Utsmani

Pada tahun 1922, Mustafa Kemal Attatürk membawa perubahan besar di Turki. Tepat di tanggal 1 November 1922, Kesultanan Ottoman dibubarkan. Enam belas hari kemudian (17 November), Sultan Mehmed VI terpaksa meninggalkan Turki. Di tahun berikutnya, 29 Oktober 1923, Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki. Puncaknya pada 3 Maret 1924, Kekhalifahan Turki Utsmani dibubarkan (Ozoglu, 2011:8). Pentas politik umat muslim telah berakhir. Namun, apakah hal itu menandakan akhir era kekuasaan politik kerajaan Islam di seluruh dunia? Inilah yang tidak diyakini KGPH Puger.

Kenyataannya menurut Team Pengurus Masjid Agung Surakarta (2013), Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat masih eksis. Ketika Turki Utsmani runtuh di tahun 1924 itu, Paku Buawana X (1893-1939) masih melanjutkan pemerintahannya. Salah satu artefak yang menjadi bukti sejarah perkembangan Islam di tangan PB X adalah semakin meningkatkan kualitas pendidikan Islam, baik dari segi struktur maupun infrastrukturnya. Kompleks Masjid Agung Surakarta yang notabene sebagai pusat penyebaran agama Islam semakin megah. Islam di Surakarta adalah ruh kehidupan keraton.

Team Pengurus Masjid Agung Surakarta (2013) lebih jauh menyatakan bahwa islamisasi atau gerak dakwah Islam di wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat tetap gencar. Khotbah Jum'at, misalnya, harus disampaikan dalam bahasa Jawa. Rekaman *Biwadha Nata* yang dicatat oleh Wangsa Leksana disebutkan, "*karena kehendak Sang Raja, mulai hari Jum'at Pon 27 Sura dal 1823, Khotbah pada hari Jum'at dan lainnya diperintahkan menggunakan bahasa Jawa...*". Dampak kebijakan Sri Sunan adalah senangnya umat muslim, meningkatnya gairah beribadah. Ditambah lagi, *mikrophone* dan *loudspeaker* digunakan agar isi khotbah terpancar ke wilayah yang lebih luas.

Tidak berhenti di situ saja, PB X melanjutkan rintisan ayahandanya (Paku Buwana IX) dalam mengembangkan lembaga Madrasah Mambaul Ulum, yaitu lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Dasar pemikirannya pun sangat nasionalis, mengusung nilai-nilai nasionalisme, yaitu melihat perkembangan kolonialisme bangsa Barat yang semakin gencar. Hal tersebut tidak serta merta bisa dilawan secara frontal, melainkan harus dihadapi dengan cara mencerdaskan putra-putri bangsa untuk mengajari mereka *melek* baca (2013:48).

Dalam konteks ruang historis dan sosiologis semacam ini, struktur pemikiran KGPH Puger terbentuk. Adalah niscaya sekiranya perjuangan membela Islam mendarah daging baik dalam jiwa KGPH Puger sebagai individu maupun dalam langkah perjuangan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai sebuah institusi. Sejarah keraton menjadi faktor utama yang memantapkan keyakinan KGPH Puger untuk tetap berjuang demi Islam, melanjutkan kekhalfahan Turki Utsmani yang telah runtuh, dan mengemban amanah umat muslim dimanapun.

Berakhirnya era kekuasaan dan kekhalfahan Turki Utsmani, dalam kacamata teori fungsionalisme Robert K. Merton, bisa dibilang berdampak ganda. Di satu sisi, terjadi disfungsi (*disfunction*), yang berarti bahwa keruntuhan kekhalfahan Islam di Turki tidak lantas berdampak pada berakhirnya masa kekhalfahan Islam di Nusantara pada umumnya dan di bumi Surakarta pada khususnya. Apabila KGPH Puger menyebut bahwa pasca runtuhnya Turki Utsmani, amanah mengemban tongkat estafet kekhalfahan beralih ke tangan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, maka pada saat itu paradigma fungsionalisme ala Merton digunakan.

Di sisi lain, *manifest function* keruntuhan Turki Utsmani tidak bisa ditolak dengan adanya setumpuk fakta-fakta historis yang mendukung kegemilangan Islam pada era pemerintahan PB X, hingga sekarang. Atas nama Raja dan Kerajaan Islam, PB X menggunakan berbagai media, baik yang konotasinya modern (baca: Mambaul Ulum) maupun yang kultural-tradisional (baca: khotbah berbahasa Jawa), telah menegaskan bahwa amanah mengibarkan bendera Islam di muka bumi belum berakhir, sebagaimana di Turki.

Abd. Halim

Sampai di level ini sudah semakin terang benderang bahwa pemikiran KGPH Puger tentang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai penerus kekhalifahan Turki Utsmani merupakan konsekuensi logis dari realitas-realitas historis-sosiologis, baik yang bersumber dari peristiwa-peristiwa di wilayah lokal, yaitu karya para raja, maupun di wilayah internasional, yaitu pembubaran khalifahan Turki. KGPH Puger sebagai individu pencetus keyakinan akan *status quo* keraton semacam itu tidak bisa memungkiri fakta-fakta sejarah gemilang ini.

Apa kemudian yang menjadi konsekuensi lebih lanjut dari *status quo* semacam itu? Jawabannya sederhana, yaitu bahwa keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak mungkin dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai pembela Islam. Bahkan, dalam keyakinan dan pandangan KGPH Puger, negara dengan keraton sebagai pusat pemerintahannya hanyalah instrumen yang didedikasikan sepenuhnya untuk menegakkan ajaran Tuhan, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Mengingat Islam adalah pedoman Tuhan tentang tata cara hidup yang benar dunia-akhirat, maka tugas keraton adalah mengatur kehidupan beragama maupun bernegara.

Sejarah mencatat bahwa infrastruktur modern kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahan PB X, seperti bangunan Pasar Gede, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari, kebun binatang (*Taman Satwataru*) Jurug, Jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, Taman Balekambang, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah bagi tunawisma, dan rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa.

Selain itu, meskipun berada dalam tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, PB X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta (1938) diadakan pada masa pemerintahannya (baca "Kasunanan Surakarta")³. Apa yang telah

³ Lebih jauh dapat ditemukan dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>

dilakukan oleh PB X adalah konsekuensi dari statusnya sebagai agen sosial, yang menata urusan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Dalam ungkapan teori fungsionalisme, begitulah fungsi seorang raja dalam menjalankan kekuasaannya.

Pusaka Keraton untuk Penegakan Agama

Selanjutnya, para pakar fungsionalisme struktural melihat bahwa semua pranata sosial serba fungsional, baik positif maupun negatif (Ritzer, 2013:23). Setelah mendedah bahwa Kasunanan Surakarta pewaris tongkat estafet kekhalifahan Turki Utsmaniyah, KGPH Puger menegaskan fungsi penting keraton sebagai perangkat utama menegakkan agama Islam. Tanpa keraton (baca: negara) maka agama tidak akan bisa dijalankan, dan karena menegakkan agama merupakan kewajiban maka menjalankan negara juga kewajiban.

Namun, lebih jauh dan substansial, KGPH Puger melihat eksistensi keraton/negara bukanlah lembaga formal yang sederhana. Sebaliknya, di dalam struktur sebuah keraton disyaratkan hadirnya 'aplikasi-aplikasi' penting yang bisa menopang keberlanjutan keraton itu sendiri. Keraton sebagai pusat pemerintahan sebuah negara membutuhkan instrumen-instrumen penting lainnya sehingga sebutan sebagai sebuah negara menjadi layak disandang.

Pusaka keraton adalah salah satu contoh yang disebutkan oleh KGPH Puger untuk menjelaskan perangkat penting di dalam sebuah negara. Pusaka keraton pada dirinya sendiri dapat dipahami sebagai benda-benda yang tidak memiliki makna, apalagi relasi langsung (*direct relations*) terhadap kepentingan penegakan agama. Namun, secara tidak langsung (*indirect relations*), eksistensi pusaka-pusakan keraton di Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak dapat dihindari. Sebab, pusaka-pusaka inilah yang menopang keutuhan keraton, ketangguhan negara, dan pada akhirnya, berperan sebagai komponen-komponen kecil upaya penegakan agama.

Keris, tombak, perisai, dan jenis-jenis pusaka keraton lainnya, di mata KGPH Puger, tak jauh berbeda dengan urgensi keberadaan alat-alat keamanan yang dimiliki pasukan militer. Di negara modern, semakin hebat perlengkapan militer sebuah negara maka semakin sulit diserang

Abd. Halim

oleh musuh yang berniat menghancurkan. Demikian pula dalam konteks keraton, semakin sakti pusaka yang dimiliki maka semakin sulit keraton dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Perhatian keraton terhadap pusaka, oleh karenanya, tidak keluar dari jalur kepentingan untuk mempertahankan negara yang dibutuhkan sebagai instrumen menegakkan agama (Wibawa, 2008:138).

Ketika sebuah negara menjadi aman, segala ancaman dari musuh dapat dipadamkan, maka otomatis negara menjadi tentram, sehingga kehidupan bergeser dari yang semua mengarah pada upaya mempertahankan negara menjadi upaya memakmurkan kehidupan. Dengan kata lain, dimensi ketentraman, keamanan, dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki relasi fungsionalis dengan eksistensi pusaka-pusaka keraton yang dirawat dan dirawat dengan baik.

Dalam ungkapan teori fungsionalisme hal tersebut di atas disebut *latent function*, yaitu suatu fungsi atau konsekuensi yang tidak tampak. Secara kasat mata bagi Wibawa (2008), bahwa kepercayaan kultural-tradisional masyarakat terhadap berkah-berkah yang dimiliki pusaka-pusaka keraton tidak memiliki relasi, tetapi bila diselidiki lebih mendalam lagi maka tampaklah betapa besar relasi konsekuensif yang menghubungkan antara pusaka dan kemakmuran umat. Dengan kata lain, apabila masyarakat Surakarta merayakan kirab budaya dengan menampilkan pusaka-pusaka keraton, pada dasarnya, merupakan cerminan dari relasi logis empiris.⁴

Cara KGPH Puger memaknai keberadaan pusaka keraton, konsekuensi kultural yang mengiringnya, serta fungsinya terhadap keamanan negara/keraton, dan puncaknya pada usaha penegakan agama, adalah cara berpikir yang realistis empiris. Metode berpikir empiris realistis ini pada dirinya sendiri mencerminkan cara pemaknaan yang *fresh* dan baru. Tetapi, bila ditilik dari fungsinya maka cara berpikir tersebut berguna untuk menjelaskan bahwa hal-hal yang berbau kultur

⁴ Salah satu pusaka Kasunanan Surakarta adalah sebuah tombak yang disebut Kyai Slamet. Menurut masyarakat, tombak Kanjeng Kyai Slamet dapat memberi berkah, keselamatan dan kesejahteraan. Apabila wilayah Surakarta menderita wabah penyakit maka tombak tersebut dikirab. Sebelum tahun 1960-an, tombak ini dikirab setiap Kamis sore menjelang malam Jum'at.

dan budaya lokal dapat berkontribusi besar terhadap dakwah dan penyebaran agama Islam.

Benda-benda pusaka dengan beragam kekuatan magisnya adalah satu dimensi, sedangkan upaya penegakan agama Islam adalah dimensi lain yang berbeda. Apabila cara pandang kita mengabaikan eksistensi negara atau keraton yang menjembatani dua dimensi tersebut maka cara pandang tersebut akan sesat dan dapat menjerumuskan. Sebab, tanpa kehadiran negara/keraton di antara dua dimensi tersebut maka relasi logis fungsional tidak bisa ditemui. Sebaliknya, apabila dipahami terlebih dahulu bahwa pusaka berguna bagi keraton, dan keraton berguna bagi negara, kemudian negara penting bagi penegakan agama maka relasi fungsionalis antara pusaka keraton dengan agama dapat dipetakan dengan jelas.

Penolakan sebagian kelompok radikal,⁵ misalnya, terhadap praktek-praktek kebudayaan, termasuk kirab pusaka, adalah cerminan dari cara berpikir yang kurang sistematis (Nuh, 2008:511). Corak empirik rasional dalam pemikiran KGPH Puger, yang mencoba membandingkan fungsi pusaka bagi keraton serupa fungsi perlengkapan militer bagi sebuah negara, adalah langkah maju yang progresif. Sehingga, dakwah islamiyah di wilayah Kasunanan Surakarta dan sekitarnya dapat ditempuh dengan jalur-jalur kultural tradisional.

Islam Solo: ‘Anak Ayam Kehilangan Induk’

Sayangnya, sebagian umat muslim Surakarta tidak berhasil menerapkan cara pandang fungsionalis struktural semacam itu. KGPH Puger menyadari dan mengamini realitas sosial yang menyebut bahwa Solo hari ini adalah sarang teroris. Keraton hari ini dikelilingi oleh kelompok-kelompok radikal. Tidak banyak orang yang mencintai kesantunan, kelembutan, kesopanan, keramahan, toleransi. Sebaliknya, pilihan-pilihan radikal, sikap-sikap anarkis, serta tingkah-tingkah nakal atas nama agama sering kali harus memenuhi ruang-ruang *headlines* media massa. Beberapa kali terbukti para pelaku bom bunuh diri adalah

⁵ Beberapa ormas berlabel agama di Surakarta menilai banyak sekali praktek kultur yang bertentangan dengan ajaran kemurnian Islam.

Abd. Halim

pelajar-pelajar yang pernah mengenyam pendidikan Islam dari kota Solo.⁶

Jika ditarik lebih jauh, bahkan sebelum kemerdekaan, radikalisme di Solo ini sudah sering terjadi. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam (SDI) bentrok dengan para pedagang Cina. SDI juga mengedepankan kekerasan pada momen yang tidak tepat saat menentang kolonial, sehingga residen Surakarta terpaksa membekukan aktifitas SDI. Sebagai reaksi, tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir yang juga pengurus pesantren Ngruki melakukan perlawanan yang serupa, namun dengan jalur-jalur yang lebih demokratis dengan memanfaatkan saluran struktur kenegaraan. Terakhir, tokoh karismatik yang oleh sebagian media dicap sebagai tokoh berpengaruh di kalangan radikal adalah Abu Bakar Ba'asyir. Tokoh ini juga berasal dari Solo (Afadlal dkk, 2005:177).

KGPH Puger menilai bahwa umat muslim di Solo dan sekitarnya adalah korban dari suburnya aliran-aliran dan kelompok-kelompok Islam yang kehilangan figur panutan. Radikalisme yang diperankan oleh sebagian umat muslim adalah konsekwensi dari absennya tokoh panutan tersebut. Sejak pemerintahan Paku Buwana I, umat muslim di wilayah Kasunanan Surakarta sudah sangat variatif, tetapi mereka mampu hidup rukun dan saling menghormati, dan tidak ada sikap saling menyalahkan, apalagi menghabisi saingan. Masing-masing kelompok dapat dengan aman dan nyaman menjalankan keyakinan masing-masing. Sekali lagi bahwa yang terpenting, kerukunan dalam keragaman dimotori oleh adanya figur panutan.

Dilihat dari kacamata teori fungsionalisme, genealogi radikalisme dan peristiwa anarkisme yang terjadi di Solo dalam pemikiran KGPH Puger adalah fenomena sosial yang oleh Robert K. Merton (dalam Holton, 2004) disebut sebagai *Reference Group*, yaitu suatu komunitas yang menempatkan individu-individu tertentu sebagai rujukan, pedoman, panutan, standar hidup ketika komunitas ini mencoba

⁶ Mengisahkan dua pelajar alumni lembaga pendidikan di Ngruki yang menempuh jalan berbedanya. Noor Huda Ismail, *Temanku, Teroris?* (Bandung: Mizan, 2010). Kasus terakhir indikator radikalisme di Solo dilaporkan oleh Kompas Judul "Densus Amankan Barang Bukti dari Kediaman Komplotan Teroris Bom Solo", dalam <http://regional.kompas.com/read/2016/>, diakses 03 Sept 2016

mengevaluasi diri sendiri dan mencari petunjuk hidup. Ketika tokoh panutan hidup masih eksis di tengah-tengah masyarakat maka bentuk keragaman aliran dan kelompok bukanlah problem sosial. Tetapi, apabila eksistensinya sudah tidak ada maka konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya adalah perpecahan.

Di Solo hari ini, selain ormas *mainstream* seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beserta organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada keduanya, ada dua kategori ormas yang bisa disebut non-mainstream. *Pertama*, organisasi non-mainstream yang dianggap “sempalan”, seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Inkarus Sunnah. LDII ini sekarang memiliki cabang yang tersebar secara merata di Surakarta. *Kedua*, ada organisasi non-mainstream yang dianggap “radikal” misalkan FPIS (Front Pemuda Islam Surakarta), bukan Front Pembela Islam-nya Habib Rizieq Shihab, sebab FPIS didirikan di Solo dan tidak ada keterkaitan dengan FPI-nya Habib Rizieq, FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid), LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Hizbullah Bulan Bintang, Barisan Bismillah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).⁷

Merebaknya ormas-ormas yang “radikal” maupun “sempalan” ini dapat ditempatkan sebagai fakta sosial. Mengingat sifatnya yang inheren sebagai fakta sosial, dan kehadirannya yang tak dapat disangkal dalam ruang historis, maka pertanyaan yang paling urgen diajukan adalah apa yang menyebabkan keragaman itu muncul?, dan apa yang akan diakibatkan oleh keragaman itu? Pertanyaan pertama mengisyaratkan bahwa keragaman ormas di Solo sebagai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan oleh faktor tertentu yang mendahului. Sedangkan pertanyaan kedua menandai bahwa keragaman ormas di Solo sebagai eksistensi yang kelak pasti memiliki konsekuensi dan akibat.

KGPH Puger berpendapat bahwa keragaman ormas di Solo, khususnya kelompok yang dinilai berpotensi radikal dan anarkis, adalah konsekuensi dari hilangnya tokoh panutan, yang seharusnya lahir dari kalangan keraton maupun tokoh masyarakat. Absennya seorang tokoh

⁷ Bahkan jumlah itu jauh lebih banyak lagi, lihat Tempo, "NU: Ada 28 Ormas Potensi Radikal di Solo Raya ", dalam : <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/11/>, diakses 04 Sept 2016

Abd. Halim

panutan menjadi faktor utama penyebab lahirnya pelbagai kelompok, baik yang disebut tradisional, moderat maupun radikal. Cara berpikir KGPH Puger yang demikian mencerminkan sudut pandang yang menempatkan keragaman ormas di Solo sebagai konsekuensi.

Sebagai sebuah konsekuensi, realitas keragaman ormas di Solo juga menjelaskan karakteristik komunitas masyarakat yang, dalam kacamata fungsionalisme, dapat dikategorikan sebagai *reference group*. Selama tokoh panutan yang mampu menyatukan keragaman dalam satu ikatan kerukunan maka realitas keragaman ini akan tetap beroperasi seperti apa adanya. Jika pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya?, maka potensi-potensi radikalisme di Solo akan tetap bertahan. Setidaknya, ketiadaan tokoh panutan yang mampu merekatkan perbedaan menjadi faktor terhambatnya usaha-usaha pemberantasan radikalisme.

Menanti “Raja Inggang Wicaksono”

Salah satu karya Yosodipura I adalah *Serat Cebolek*. Ajaran-ajaran dari *Serat Dewaruci* tentang penghayatan gaib yang dialami oleh Arya Sena menjadi pembahasan inti. Secara keseluruhan, konsep yang ditawarkan adalah *Manunggaling Kawulo Gusti*. Pelajaran yang bisa dipetik adalah keniscayaan sikap dalam “memanusia akan manusia”. Setiap manusia memiliki karakter, kepribadian, pola pikir, tingkat kesadaran, dan kualitas pengetahuan yang berbeda-beda. “Memanusiakan-manusia” adalah satu idiom yang menggambarkan tentang suatu sikap hidup yang memperlakukan orang lain sesuai tingkat kesadaran orang lain tersebut.

Bagaimana bentuk konkrit dari sikap memperlakukan orang lain sesuai kadar dan kualitas orang yang dihadapi? Jawabannya sederhana, yaitu dengan cara menyadarkan orang lain akan jati dirinya, memberi tahu bahwa di luar ada hal lain yang berbeda, dan tidak menghukumnya sesuai standar hidup yang tidak dipahami, tetapi menghukumnya sesuai tingkat dan kualitas pengetahuan orang yang bersangkutan. Raja-raja Pajang dan Mataram banyak berpedoman dengan ajaran tersebut. Tidak heran jika cerita ini dibuat untuk menjaga istana tetap sebagai pelindung

tradisi Jawa, yang pada umumnya menganut ajaran *Manunggaling Kawulo Gusti* (Amrullah, 1960:114).

Dalam konteks ruang historis-kultural semacam itu, serta dalam kepeungan realitas modern, apa yang kemudian KGPH Puger pikirkan adalah jawaban solutif. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki warisan-warisan intelektual dan khazanah kebudayaan yang toleran. Sementara di sisi yang berseberangan, masyarakat hidup dalam kungkungan perbedaan ormas yang sangat variatif. KGPH Puger berpikir bahwa datangnya seorang sosok raja yang bijaksana (*wicaksono*) adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Bijaksana yang dimaksud adalah karakter atau kemampuan untuk menembus batas-batas perbedaan, dan meraih titik temu yang mampu mempersatukan, sehingga *Bhinneka Tunggal Ika* bukan prinsip omong kosong tanpa contoh konkrit yang aplikatif.

Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya basis-basis yang berpotensi radikal, berdasar pemikiran KGPH Puger, mewakili apa yang dirumuskan oleh William Thompson dan Josep Hickey (2005) yang mengatakan bahwa “*Reference groups are groups that people refer to when evaluating their [own] qualities, circumstances, attitudes, values and behaviors.*” Masyarakat memiliki banyak pimpinan, dan setiap pimpinan masih merasa lebih nyaman tidak mengikuti orang lain selain dirinya sendiri. Untuk itulah, keragaman tidak bisa dihindari sebelum ada satu pimpinan tunggal yang bisa diterima oleh banyak pimpinan, sehingga eksistensi keragaman tetap terjaga tetapi dalam satu naungan tokoh panutan *ing kang wicaksono*, kata KGPH Puger.

Selain karya di atas ada karya piwulang lain yang sangat digemari di kalangan masyarakat Jawa yaitu *Serat Sasanasunu* karya Yosodipura II. Ditulis ketika kerajaan mengalami krisis sosial budaya. Masuknya peradaban Barat ke Istana Kerajaan Jawa di Abad ke-19 M., membawa dampak perubahan besar (Kartodirdjo, 1987:16). Isi dari *Serat Sasanasunu* mengenai pembinaan watak yang baik dan ideal yaitu merefleksikan konfigurasi perwatakan priyayi, santri, petani, dan saudagar secara harmonis atau seimbang dalam kejiwaan seseorang.

Penyerapan nilai positif dari etos priyayi, santri, petani, dan saudagar memberikan tata cara berkehidupan yang ideal. Ajaran tersebut

Abd. Halim

menurut Wardhana (2014) adalah kesopanan, orang yang beradab dari seorang priyayi, kemudian kejujuran, berhati suci adalah gambaran seorang santri, penggambaran seorang petani adalah ketekunan, tidak gampang mengeluh dan mau bekerja keras, jika ajaran dari seorang saudagar adalah hemat, penuh perhitungan, hati-hati, senantiasa memperhitungkan resiko-resikonya dalam melangkah. Pelbagai *attitude* luhur di atas adalah kualitas-kualitas yang selayaknya dimiliki *raja ingkang wicaksono*. Sebab, hanya dengan kemampuan melebur di semua golongan, mengkomunikasikan berbagai golongan serta mencari jalan keluar dari kebuntuan, merukunkan pihak-pihak yang berkonflik, mendamaikan berbagai kepentingan yang bertabrakan, maka keragaman masyarakat Solo bisa diredam. KGPH Puger meyakini bahwa jalur-jalur kultural yang sekaligus merupakan warisan budaya leluhur semacam itu, khususnya dalam rangka menyebarkan Islam dan menegakkan agama Tuhan di muka bumi, adalah alternatif yang lebih solutif.

Simpulan

KGPH Puger sebagai salah satu aktor sosial hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang sistem tatanan strukturalnya sudah terbentuk sekian lama. Pada sisi lain, KGPH Puger berperan sebagai *rijaalud-dakwah* beserta pemikiran-pemikirannya adalah merupakan konsekuensi, baik yang tampak maupun tak tampak, dari struktur-struktur yang melingkupinya. Dengan kata lain, idealisme KGPH Puger dapat dikatakan cerminan dan reaksi terhadap struktur di luar yang membentuknya. Dia (baca- KGPH Puger) sekali lagi adalah agen sosial sekaligus representasi pelaku dakwah yang bertugas menjadi penjaga harmoni bangunan agama, negara dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun. Tugasnya untuk memastikan bahwa ketentraman sosial harus benar-benar berlangsung.

Bagi seorang KGPH Puger yang terpenting untuk disadari dalam konfigurasi masyarakat Solo modern bahwa cerminan masyarakatnya majemuk; baik secara sikap, pola pikir, keyakinan dan kelompok. Kegagalan masyarakat Solo khususnya, yang kemudian dicap sebagai basis terorisme dan radikalisme oleh media nasional, adalah akibat dari absennya seorang tokoh panutan yang *wicaksono*. Padahal, keraton

sebagai simbol pusat kekuasaan diberi amanah, baik langsung atau tidak, untuk melanjutkan tradisi kekhalifahan Turki Utsmani. Radikalisme, di satu sisi, dapat dikategorikan sebagai ketidakpuasan umat muslim dengan tatanan yang ada. Di sisi lain, radikalisme adalah dampak dari kekosongan pemimpin yang ideal. Padahal, catatan sejarah dan nilai-nilai lokal di masa silam pernah berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang ideal.

Dengan demikian, Islam, keraton (negara), dan nilai-nilai kebudayaan adalah pendulum-pendulum yang terus berayun. Apabila tali-tali pengikatnya tidak kuat, maka masing-masing pendulum akan terlepas dan beroperasi tanpa kendali, yang mungkin saja akan saling bertabrakan satu sama lain. Radikalisme adalah cipratan kecil dari sekian bukti tentang putusnya tali pendulum ini. Setidaknya ada usaha kembali bahwa keraton di negara Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini berperan menjadi suri tauladan, yang mampu menyatukan perbedaan, sehingga upaya-upaya memakmurkan dan mengibarkan bendera Islam di muka bumi bisa berjalan lancar tanpa hambatan.

Referensi

- Afadlal, dkk. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Amrullah, K. A. M. (1960). *Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad*. Pustaka Keluarga: Jakarta.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Holton, G. (2004). Robert K. Merton: Biographical Memoirs. Dalam *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 148.
- Ismail, H. N. (2010). *Temanku, Teroris?*. Bandung: Mizan.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Beberapa Segi Etika Dan Etiket Jawa*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Bagian Jawa.

Abd. Halim

- M. Nuh, N. (2008). *Agama dan Perubahan Sosial Abad 21*. Jakarta: Depag RI, Badan Litbang dan Diklat.
- Ozoglu, H. (2011). *From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic*. California: ABC-CLIO, LLC.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ritzer, G. (2013a). *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ritzer, G. (2013b). *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Team Pengurus Masjid Agung Surakarta. (2013). *Sejarah Masjid Agung Surakarta*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Thompson, W., dan Hickey, J. (2005). *Society in Focus: An Introduction to Sociology*, Boston MA: Pearson.
- Wardhana, D. C. (2014). Ajaran Catur Budi Dalam Serat Sasanasunu Karya Kyai Yasadipura II. *Jurnal Jumantara* , 5(1).
- Wibawa, P. (2008). *Tosan Aji; Pesona Jejak Prestasi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Wulansari, D. (2013). *Sosiologi; Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulansari, D. (2016a). *Kasunanan Surakarta*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/>.
- Wulansari, D. (2016b). Densus Amankan Barang Bukti dari Kediaman Komplotan Teroris Bom Solo. *Kompas*. Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/>.
- Wulansari, D. (2016c). NU: Ada 28 Ormas Potensi Radikal di Solo Raya. *Tempo*. Diakses dari : <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/11/>.